

**PERANAN HAMENGGU BUWONO IX
DALAM PERJUANGAN AWAL KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA (1945-1949)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Disusun oleh:
Akhmad Alwi
NIM : 03121498

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKUTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2009**

PENYATAAN KEASLIAN

Nama : Akhmad Alwi
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 21 November 1984
Nim : 03121498
Jurusan/prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab
Alamat asal : Jl. Bakti Jaya Rt/Rw : 10/17 Harapan Jaya Bekasi Utara Jawa Barat.
Cp : 02743278563
Judul skripsi : PERANAN HAMENGKU BUWONO IX DALAM PERJUANGAN AWAL KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (1945-1949)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa karya tersebut bukan hasil dari tulisan saya, maka saya bersedia menanggung sangsi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Juni 2009




Akhmad Alwi

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan baik segi metodologi, isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Akhmad Alwi
Nim : 03121498
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : PERANAN HAMENGKU BUWONO IX DALAM PERJUANGAN
AWAL KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (1945-1949)

Maka selaku pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr.Wb

Yogyakarta, 16 Juni 2009
Pembimbing



Drs. H. Maman Abdul Malik Sy, M.S
NIP. 19551220 198003 1 003



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fax. (0274) 513949

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/1236/2009

Skripsi dengan judul : PERANAN HAMENGKU BUWONO IX DALAM PERJUANGAN AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA
1945-1949

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD ALWI

NIM : 03121498

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Juni 2009

Nilai Munaqasyah : B-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang,

Drs. H. Maman Abdul Malik Sy., M.S
NIP.19511220 198003 1 003

Penguji I,

Dra. Hj. Ummi Kulsum M. Hum
NIP. 19531222 198308 2 001

Penguji II,

Zuhrotul Latifah, M. Hum
NIP. 19701008 199803 2 001

Yogyakarta, 29 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab

DEKAN



Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M. Ag.
NIP. 19520921 198403 1 001

MOTTO:

SETIAP ORANG MEMILIKI SEJARAH MASING-MASING,
GUNAKANLAH TINTA EMAS KEMANUSIAAN DALAM
MENULISNYA. KENISCAYAAN SEBUAH PERADABAN
TERLETAK PADA MANUSIA YANG MENOREHKAN
SEJARAHNYA.

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan;
Untuk Ayah dan Bunda tercinta yang selalu mengerti dengan kenakalanku,
kenylenehanku dan ketidaksabaranku.
Kakakku yang selalu rewel dalam mengomentariku,
terima kasih telah memberikan inspirasi kepadaku.
Adik-adikku tersayang jadilah diri sendiri
Untuk Neng-ku terkasih yang tiap saat mau membantu proses penulisan skripsi dari
awal sampai tulisan ini layak dibaca.
Makasih ya sayang.*

ABSTRAK

Awal kemerdekaan Republik Indonesia ditandai dengan pembacaan Proklamasi oleh Soekarno di lapangan Banteng Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini disambut baik oleh segenap masyarakat Indonesia di seantero Nusantara. Begitu juga Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, ketika mendengar tentang kemerdekaan Indonesia dia langsung mengirim surat kawat (*telegram*) kepada Soekarno yang memberikan selamat atas kemerdekaan Indonesia dan mendukung sepenuhnya lahirnya Republik Indonesia .

Telegram ini merupakan suatu pertanda penyatuan dua negara, antara negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Republik Indonesia. Kemudian Sri Sultan HB IX mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945, yang intinya “Kesultanan Yogyakarta melebur dalam satu kesatuan Republik Indonesia”.

Pada tahun 1949, ada sebuah peristiwa yang dinamakan “Operasi Janur Kuning” (sekarang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949). Dinamakan demikian karena operasi yang dipimpin oleh Soeharto memakai janur kuning sebagai tanda, operasi itu terpusat di kota Yogyakarta untuk mengusir pemerintahan Belanda. Pada peristiwa itu peran Sri Sultan HB IX sangat penting karena dia merelakan keratonnya sebagai tempat persembunyian tentara Republik Indonesia ketika mereka dikejar-kejar oleh Belanda.

Kedua kisah di atas adalah gambaran perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai seorang raja dan seorang republiken. Pertanyaan yang muncul adalah : Mengapa Sultan HB IX repot-repot mendukung Republik Indonesia dengan menggabungkan Kesultanan Yogyakarta ke dalam pemerintahan Republik Indonesia? Kepentingannya apa dan apa yang akan didapatkannya? Apa yang mendasarinya? Padahal pemerintahan Belanda menjanjikannya sebagai raja seluruh pulau Jawa.

Inilah yang membuat saya berniat mengangkat judul di atas sebagai skripsi saya, semoga abstrak ini mendapat tindak lanjut sehingga di masa yang akan datang bisa dijadikan salah satu referensi sejarah.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين .

Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kekuatan sehingga kita masih bisa meneruskan perjuangan sebagai umat yang selalu tunduk dan patuh kepada-Nya. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis haturkan kepada tokoh revolusioner kita yaitu nabi besar Muhammad Saw, semoga jejak langkahnya memberikan inspirasi perjuangan bagi kita semua untuk melangkah ke arah yang lebih baik lagi.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa ada bantuan dari banyak pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Adab Prof. Dr. Syihabuddin Qalyubi, Lc. M.Ag
3. Ketua 3 Jurusan SKI, Bapak Dr. Maharsi, SS.M.Hum. yang telah banyak membantu saya dalam bidang nilai sks yang saya lewatkan.

4. Pembimbing Akademik Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si yang dengan sabar dan bijaksana telah membimbing penulis dalam 6 tahun ini sehingga penulis bisa lulus dari kampus tercinta.
5. Pembimbing skripsi Drs. H. Maman Abdul Malik Sy, M.S yang telah sabar membimbing saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas ADAB UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan sabar selama penulis menempuh studi.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendidik saya mulai sejak dalam kandungan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi. Maafkan saya yang telah banyak berbohong tetapi kalian mau memaafkan segala kesalahan saya. Jasamu tidak akan pernah saya lupakan sampai akhir hayat nanti.
8. Kakakku yang suka memberikan nasehat pada penulis (Mpok Nur), maksih ya atas pulasanya, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah s.w.t. Amin.
9. Adik-adikku, Istiqomah (Iis), Muhammad Dzunurain (Keke), Khoirunnisa (Ani). Jangan seperti mas ya, dah banyak menyusahkan orang lain, terutama ayah dan bunda. Belajar yang rajin agar berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.
10. Istriku tercinta “ Neng Siti Lestari” yang selalu tersenyum dan senantiasa membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
11. Teman-teman GmnI yang terkasih, Abu Hasan (Mudoy), RM. Ganang Prabantara, Gogon, Sudaedy (Dewa Ideologi) cepat lulus ded, Toha yang selalu berganti pacar (*Sadar Woi*), Jantan, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu, secara sadar maupun tidak, telah menghantarkan saya dalam proses berfikir. Selamat berjuang kawan. Merdeka !!!

12. Tak lupa pula, rekan-rekan saya di Kordiska, yang telah membentuk spiritual keislaman saya yang tadinya kaku menjadi lebih luas dalam memandang agama Islam.

Besar harapan penulis kiranya agar skripsi ini dapat diapresiasi, diaplikasikan dan tentunya bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Kesadaran bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu, penulis menerima kritik serta saran yang membangun. Mudah-mudahan karya sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya penulis dan umumnya bagi mereka yang berkepentingan.

Yogyakarta, 16 Juni 2009
Penyusun,

Akhmad Alwi
NIM : 03121498

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Landasan Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II : GAMBARAN UMUM YOGYAKARTA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA

A. Sejarah Politik Yogyakarta Sebelum Kemerdekaan	17
B. Kondisi Politik Yogyakarta Pada Awal Kemerdekaan RI....	20
C. Yogyakarta Sebagai Ibukota Republik Indonesia.....	26
D. Kondisi Masyarakat Yogyakarta Pada Masa Awal Kemerdekaan RI.....	30

	E. Wilayah Yogyakarta Pada Masa Awal Kemerdekaan RI.....	32
BAB III	: PANDANGAN HAMENGGU BUWONO IX TERHADAP KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	
	A. Latar Belakang Pemikiran Hamengku Buwono IX.....	39
	B. Respon HB IX Terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI.....	44
BAB IV	: UPAYA YANG DILAKUKAN HAMENGGU BUWONO IX DALAM MEMPERTAHANKAN AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA	
	A. Hamengku Buwono IX Membuat Laskar Rakyat.....	51
	B. Hamengku Buwono IX dan Mata Uang Perak.....	52
	C. Mengungkap Fakta Sejarah Tentang Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.....	56
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pemerintahan pusat dibentuk di Jakarta akhir bulan Agustus 1945. Pemerintahan ini menyetujui konstitusi yang dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk sebelum Jepang menyerah pihak Amerika dan sekutu. Setelah pembacaan proklamasi, Soekarno diangkat sebagai Presiden (1945-1967) dan Moh Hatta sebagai Wakil Presiden (1945-1956).

Pemerintahan pusat mulai berbenah diri, salah satu yang diutamakan yaitu menentukan wilayah-wilayah yang masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintahan pusat secara *de jure* memakai wilayah-wilayah kekuasaan Belanda menjadi wilayah-wilayah kekuasaan Indonesia. Pihak Republik tidak mempunyai hak terhadap wilayah-wilayah di luar kekuasaan Belanda ketika itu. Sementara itu, wilayah kekuasaan Solo-Yogya disebut *Voorstenlanden* yaitu daerah yang dipertuan oleh Kasunanan Solo, Mangkunegaran, Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman tidak berada di wilayah kekuasaan Belanda.¹ Di puncak sejarah inilah nasib keempat wilayah menjadi sangat berbeda juga nasib kehidupan keraton-keratonnya kelak. Kasunanan Solo dan Mangkunegaran bimbang, bahkan separuh menolak bergabung dengan Republik Indonesia. Mereka takut bila bergabung dengan Republik kerajaan-kerajaannya akan dibubarkan,

¹ Sutrisna Kutoyo, *Sri Sultan HB IX Riwayat Hidup dan Perjuangan* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995) hlm. 38

karena mereka beranggapan bahwa pemerintahan Republik Indonesia itu sosialis, yang menolak adanya bentuk feodalisme. Sementara itu, Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman berkeyakinan bulat mendukung dan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bergabungnya Kesultanan Yogyakarta ini merupakan simbol bahwa Raja Jawa (Jawa adalah simbol dari pusatnya Nusantara) berdiri di belakang Soekarno-Hatta, yang berarti dari sisi budaya kemerdekaan RI mendapatkan legitimasinya.

Ketika itu Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Ia dilahirkan di Dalem Pakuningratan kampung Sompilan Ngasem pada hari Sabtu Phaing tanggal 12 April 1912 atau menurut *tarikh* Jawa Islam pada tanggal 25 *Rabingulakhir* tahun 1842 dengan nama Dorodjatun.² Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Puruboyo dan Ibunya bernama Raden Ajeng Kustilah. Ketika Dorodjatun berusia 3 tahun beliau diangkat menjadi Putera Mahkota (calon raja) dengan gelar *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sudibya Raja Putera Narendra Ing Mataram*.³ Kemudian Dorodjatun dinobatkan sebagai raja Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar *Sampyandalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo, Kalifatullah Inkgang Kaping IX*.⁴

² Mohmmad Rozin, dkk. *Tahta Untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 24

³ G. Moejanto, *Konsep Kekuasaan Jawa* (Yogyakarta: Kanisius. 1987), hlm. 121

⁴ Berbeda dengan gelar yang dipakai seorang kepala negara di Surakarta yakni Sunan atau Susuhunan sehingga melahirkan konsep kesunanan Surakarta. Dikisahkan pula bahwa pembesar Belanda terkejut dengan pemakaian gelar Sultan oleh Mangkubumi karena dinilai lebih tinggi

Hamengku Buwono IX merupakan contoh bangsawan yang demokratis. Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak perubahan di bawah pimpinannya. Pendidikan Barat yang dijalannya sejak usia 4 tahun membuat Hamengku Buwono IX menemukan banyak alternatif budaya untuk menyelenggarakan pemerintahan Keraton Yogyakarta di kemudian hari. Berbagai tradisi keraton yang kurang menguntungkan dihapusnya dengan alternatif budaya lain.⁵ Meskipun begitu, bukan berarti ia menghilangkan substansi tradisi itu sendiri. Bahkan wawasan budaya yang luas mampu menemukan terobosan baru untuk memulihkan kejayaan kerajaan Yogyakarta.

Peranan Hamengku Buwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan mempersiapkan rakyat Yogyakarta menyambut kemerdekaan Indonesia, serta memberikan dukungan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian menggabungkan Yogyakarta ke dalam Kesatuan Republik Indonesia. Hamengku Buwono IX menggunakan bahasa Indonesia untuk menggantikan bahasa Jawa di kalangan pejabat pemerintahan. Ia juga membentuk laskar rakyat yang setia kepadanya. Dia memang memainkan dengan sengaja peranan militer seperti yang dilakukan para raja sebelum masa penjajahan, sehingga dia menganggap dirinya sebagai perwira tentara dan diakui demikian oleh para panglima tentara Republik.⁶

daripada Susuhunan. Lihat G. Moejanto, *Konsep Kekuasaan Jawa*. (Yogyakarta: Kanisius. 1987). hlm. 122

⁵ Budaya-budaya yang dimaksud adalah budaya yang bersifat feodal, kemudian diubah menjadi budaya yang merakyat.

⁶ M.C. Ricklefs., *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: UGM press, 1991), hlm. 329

Pada tahun 1946 Belanda menduduki Jakarta, sehingga Hamengku Buwono IX sebagai Sultan meminta Soekarno dan Hatta agar memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta selama masa revolusi. Pendudukan Belanda atas Bandung dan Jakarta itu berarti hilangnya kekuasaan Indonesia atas sekolah-sekolah tinggi yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, Hamengku Buwono IX menyediakan gedung *Siti Hinggil*⁷ dipakai oleh Akademi Ilmu Politik (AIP), yang kemudian meleburkan diri dalam Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial dan Politik Perguruan Tinggi Gajah Mada.⁸ Dengan demikian, seperti yang ditulis oleh salah seorang penasihat Sultan yang terdekat, di Yogyakarta “revolusi tidak mungkin dapat mendobrak pintu-pintu istana, karena pintu-pintu itu telah terbuka lebar”.⁹

Dengan Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia otomatis memerlukan biaya yang sangat besar untuk penyelenggaraan negara yang baru saja merdeka. Sedangkan kas negara pada saat itu belum ada. Di sini Sultan memberikan bantuan pada negara berupa uang gulden untuk membiayai semua keperluan negara pada masa-masa sulit seperti saat itu.

Pada tahun 1949 terjadi pertempuran antara tentara Republik dan Belanda. Pertempuran ini merupakan ajang pertempuran terakhir sebelum Belanda meninggalkan Indonesia dan juga merupakan bukti masih adanya

⁷ *Siti Hinggil* merupakan salah satu gedung pertemuan yang berada di dalam keratin. Berada dekat dengan alun-alun selatan.

⁸ Abrar Yusra, *Biografi Komat-Kamit Selo Sumardjan* terj, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1995) hlm. 182-185

⁹ Ricklefs. M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, hlm 330

tentara Republik. Selaku Menteri Pertahanan, Hamengku Buwono IX memprakarsai pertempuran tersebut, berkoordinasi dengan Letkol Soeharto untuk menyerang Yogyakarta sehingga dapat mengalahkan Belanda. Pertempuran itu kemudian dikenal sebagai “Serangan Umum 1 Maret 1949”.¹⁰ Kemenangan tentara republik pada pertempuran itu memperkuat daya tawar diplomasi Indonesia, sehingga Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian *Roem-Royen*, yang salah satu isinya, yaitu menarik pasukan Belanda dari Yogyakarta, sebagai prasyarat bagi diselenggarakannya perundingan menyeluruh antara pihak-pihak terkait, yang kemudian dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB).¹¹

Penyerahan kedaulatan Indonesia berlangsung 27 Desember 1949 di dua tempat. Pertama di Belanda, dari Ratu Juliana kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Moh. Hatta dan kedua di Indonesia, dari tangan Dr. Lovink kepada Hamengku Buwono IX selaku Menteri Pertahanan Negara.¹²

Seperti disebutkan di atas, peranan Hamengku Buwono IX sangatlah penting pada masa revolusi kemerdekaan RI sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang peranan Hamengku Buwono IX dalam perjuangan awal kemerdekaan RI pada tahun 1945-1949.

¹⁰ Abrar Yusra, *Biografi Komat-Kamit Selo Sumardjan*. hlm. 176

¹¹ Marwati D. Poesponegoro, Nugroho Notosusantao, *Sejarah Nasional Indonesia VI* hlm 350

¹² Abrar Yusra, *Biografi Komat-Kamit Selo Sumardjan*. hlm 186-187

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada peranan Hamengku Buwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945-1949. Yang dimaksudkan dengan peranan Hamengku Buwono IX adalah keterlibatan dan kontribusi Hamengku Buwono IX dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Batasan waktunya dari tahun 1945-1949, ini didasarkan pada tahun 1945 merupakan tahun diproklamirkan kemerdekaan RI, sekaligus sebagai awal perjuangan revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, sedangkan tahun 1949 merupakan tahun terjadinya penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda ke pihak Republik Indonesia.

Pelacakan atas peristiwa-peristiwa serta penjabaran permasalahan tersebut, dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hamengku Buwono IX terhadap kemerdekaan Republik Indonesia?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran dan tindakan yang diambil Hamengku Buwono IX dalam menyikapi proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta untuk mengetahui peranan yang dilakukan Hamengku Buwono IX dalam memperjuangkan dan

mempertahankan kemerdekaan hingga penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda.

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang Hamengku Buwono IX untuk dijadikan contoh generasi muda, agar selalu membela Indonesia dimanapun mereka berada serta memberi kontribusi keilmuan sejarah Indonesia yang dalam hal ini banyak sejarah lokal yang mampu mewarnai khasanah sejarah nasional Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan pokok. *Pertama*, buku yang berjudul : *Tahta Untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, yang dihimpun oleh Mohammad Rozin, Mochtar Lubis, Kusniyati Mochtar dan S. Maimoen. Jakarta, PT. Gramedia, 1982. Buku ini memuat biografi Hamengku Buwono IX dan perjalanan karirnya. Di dalamnya diceritakan bagaimana perjalanan hidup Hamengku Buwono IX dari masa kanak-kanak sampai tutup usia, sepak terjangnya dalam perpolitikan di tanah air dari zaman Belanda sampai Indonesia berkuasa. Buku ini menggambarkan Hamengku Buwono IX sebagai Sultan yang cerdas dan tegas dalam memerintah Yogyakarta. Penulis menggunakan buku ini untuk membahas biografi Hamengku Buwono IX.

Buku yang berjudul: *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, yang di tulis oleh Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho

Notosusanto, menjadi acuan utama penulis terutama dalam mengetahui sejarah nasional yang baku, sehingga memudahkan penulis untuk menuliskan rentetan sejarah Indonesia secara umum ataupun khusus. Di buku tersebut di jabarkan secara gamblang tentang Indonesia pada saat di duduki Jepang hingga pasca kemerdekaan. Kejadian penting seperti Konferensi Meja Bundar, perjanjian Roem Royen, serta serangan umum 1 Maret 1949 tercover jelas dalam buku tersebut.

Selain itu, buku karangan Pj. Suwarno yang berjudul : *Hamengku Buwono IX dan Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta (1942-1974)*, Yogyakarta, Kanisius, 1984. Buku ini lebih menitikberatkan pada proses perubahan birokrasi pemerintahan Yogyakarta mulai sejak kedatangan Jepang sampai integritas Yogyakarta dengan Republik Indonesia, sehingga pembahasannya lebih mengutamakan pada masalah interen dalam pemerintahan Yogyakarta. Penulis menggunakan buku ini untuk mengetahui kinerja Hamengku Buwono IX dalam memerintah Yogyakarta pada awal kemerdekaan.

E. Landasan Teori

Pendekatan yang digunakan yaitu *behavioral* yang merupakan salah satu dari pendekatan ilmu sosial. *Behavioral* menjelaskan “mengapa orang secara politik bertindak sebagaimana yang dia lakukan, proses dan sistem-

sistem politik berfungsi sebagai hasilnya”.¹³ Pendekatan ini tidak hanya pada peristiwanya, akan tetapi tertuju pada pelaku sejarah dalam situasi yang dihadapi. Dalam menafsirkan suatu tindakan yang menyebutkan suatu kejadian sejarah, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sehingga dari penafsiran tersebut muncul tindakan yang menimbulkan suatu kejadian dan selanjutnya timbul konsekuensi dari tindakannya. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Hamengku Buwono IX merupakan konsekuensi yang dilakukannya sebagai anak bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia

Teori yang digunakan adalah teori konflik, menurut George Ritzer masyarakat senantiasa berada dalam proses yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.¹⁴ Teori konflik menggunakan prinsip koersi untuk mendorong melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Perjuangan untuk memperebutkan kekuasaan adalah suatu yang diutamakan dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat.¹⁵ Konsep sentra teori ini adalah wewenang dan posisi, keduanya merupakan fakta sosial. Kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor

¹³ Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 80

¹⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimanda (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 26.

¹⁵ Rustam E. Tambukara, *Pengantar Ilmu Sejarah Teori, Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, dan IPTEK* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 101.

yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat.

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa.¹⁶ Oleh karena itu kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan yang nyata yang bertentangan secara substansial secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi dimana golongan yang berkuasa berusaha untuk mempertahankan *status-quo*, sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan selalu ada dalam setiap waktu dan dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti *status-quo*.¹⁷ Situasi semacam ini tidak akan pernah berakhir bila tidak dilakukan dengan kekerasan, oleh karena itu golongan yang ditindas harus menghimpun diri untuk bersama-sama

¹⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan*, hlm. 26.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

mengubah sistem sosial yang lama, diganti dengan sistem yang baru. Menurut Karl Marx, hal ini dikenal dengan *Manifesto Komunis*.¹⁸

HB IX merupakan raja di Kasultanan Yogyakarta. Dengan menggunakan kekuasaannya dia berhasil merubah tatanan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kekuasaan yang di miliknya digunakan untuk merebut kekuasaan (RI) dari tangan penjajah dan menjadikan Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Kepentingan negara (masyarakat) adalah mempertahankan kedaulatan RI dan HB IX bersama dengan negarawan-negarawan yang lain meramu pemikiran-pemikiran mereka sehingga perpaduan untuk mempertahankan kemerdekaan ahirnya bisa terwujud.

F. Metode Penelitian

Sejarah merupakan rekontruksi masa lalu yang terkait pada prosedur penelitian ilmiah.¹⁹ Dengan demikian untuk memperoleh sejarah yang ilmiah maka diperlukan sebuah metode penelitian. Sebagai upaya mendapatkan gambaran yang jelas serta terperinci sesuai yang diharapkan, maka penulis menggunakan metode historis yaitu proses menguji dan menganalisa rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.²⁰ Analisa secara kritis dan juga penyajian sintesa diharapkan dapat menyajikan kisah

¹⁸ Rustam E. Tambukara, *Pengantar Ilmu Sejarah Teori*, hlm. 102.

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta. Benteng Budaya, 1995) hlm. 45

²⁰ Louis *Gottshalk*, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto.(Jakarta : UI press. 1986). hlm. 32

sejarah yang dapat dipercaya.²¹ Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan Data)

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder berupa sumber tertulis atau literer. Pencarian sumber tertulis melalui buku-buku sejarah, jurnal-jurnal, skripsi-skripsi, website dan koran-koran yang berhubungan dengan Hamengku Buwono IX di warnet-warnet terdekat dan berbagai perpustakaan di antaranya perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan Keraton Yogyakarta serta perpustakaan Daerah Yogyakarta. Penulis kesulitan dalam mencari sumber primer, karena akses pencarian sumber primer sangat terbatas. Ini penulis alami pada saat mencoba mencari data di lingkungan keraton sehingga penulis hanya menggunakan sumber sekunder.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi yaitu menguji dan menganalisa data secara kritis. Verifikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mencari keautentikan sumber. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik terhadap sumber-sumber tersebut dilakukan melalui kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan untuk meneliti keaslian data, sedangkan kritik ekstern dilakukan dengan cara memperlihatkan aspek fisik sumber

²¹ Anton Bekker dan Ahmad Chares Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 52

tertulis, yaitu dilihat dari kertasnya, tintanya, gaya tulisan, bahasanya, ungkapannya, kata-katanya, huruf-hurufnya dan segi penampilan luarnya.²² Penulis dalam melakukan kritik data berangkat dari data itu sendiri. Jadinya tidak asal memasukkan data karena di satu sisi berhubungan dengan tema yang penulis angkat, akan tetapi juga melihat sisi lainnya.

3. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi yaitu menafsirkan fakta yang saling berhubungan dari data yang teruji kebenarannya. Dengan interpretasi ini penulis mencoba mengaitkan beberapa sumber dengan pendekatan *behavioral* untuk memudahkan dalam merangkai peristiwa-peristiwa sejarah tentang peran yang dilakukan Hamengku Buwono IX pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan teori konflik untuk menentukan langkah-langkah penulisan sejarah.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi yaitu menyusun deskripsi secara kronologis sehingga menjadi uraian sejarah yang utuh, yaitu untuk menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain. Proses ini bertujuan untuk menjadikan sebuah pangkalan sejarah. Setiap pembahasan ditempuh melalui deskripsi dan analisa dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dari suatu peristiwa. Historiografi merupakan langkah penyajian atau langkah

²² Abdurahman. Dudung *Metode Penelitian Sejarah*. (Jakarta: Logos Wacana, 1999) hlm. 59

terakhir untuk penulisan data yang telah melewati beberapa proses penyaringan, sehingga mendapatkan kesimpulan yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini penulis bagi ke dalam beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab sesuai keperluan kajian yang dilakukan.

Bab pertama, menjelaskan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan.

Bab kedua, membahas gambaran umum Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan meliputi sejarah politik Yogyakarta sebelum kemerdekaan, kondisi politik Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan RI, Yogyakarta sebagai ibukota RI, kondisi masyarakat Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan RI dan wilayah Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan RI.
Penulis

Bab ketiga, membahas tentang pandangan Hamengku Buwono IX terhadap kemerdekaan Republik Indonesia meliputi latar belakang pemikiran Hamengku Buwono IX dan mengemukakan respon Hamengku Buwono IX terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI. Penulis mengulas secara singkat untuk menunjukkan karakter pemikiran yang menghasilkan akulturasi budaya Barat dan Jawa yang secara gamblang terkristalisasi dalam karakter unik, yaitu mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa tetapi menggunakan konsep-konsep

modern dalam membangun keraton Ngayogyakarta, serta memaparkan respon Hamengku Buwono IX yang mengantarkan Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI.

Bab keempat, membahas tentang upaya yang dilakukan Hamengku Buwono IX ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang meliputi, Hamengku Buwono IX membuat laskar rakyat, Hamengku Buwono IX dan mata uang perak, pada sub-bab ini menceritakan bagaimana HB IX membiayai pemerintahan RI untuk berjuang pada masa awal kemerdekaan. Pada bab ini juga penulis mencoba mengeksplorasi beberapa gambaran tentang kontroversi yang merebak dalam wacana sejarah terkini pasca tumbanganya Orde Baru. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa sejarah masa lalu Indonesia tidak lepas dari desain penguasa yang sengaja dibuat untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam pengungkapan sejarah masa lalu di perlukan sebuah keberanian dalam merekonstruksi sejarah sebagai upaya pelurusan sejarah yang sempat terciderai oleh oknum yang menghendaki kekuasaan semu. Selanjutnya dibahas juga tentang kronologis peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Hal ini penting dibahas guna memberikan gambaran secara objektif yang berangkat dari beberapa referensi. Berikutnya baru kemudian penulis mengeksplor tentang Hamengku Buwono IX dan kaitannya dengan serangan umum 1 Maret 1949. Terakhir, penulis membahas peran Hamengku Buwono IX dalam penyerahan kedaulatan RI.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan intisari dari analisa dan

uraian sebelumnya, yang dikemas dalam sebuah kesimpulan. Kesimpulan dimaksudkan sebagai jawaban penulis mengenai peranan Hamengku Buwono IX dalam perjuangan awal kemerdekaan RI tahun 1945-1949.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ada suatu pepatah bahwa “harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jasa”. Tidak bisa dipungkiri kalau Sultan adalah pahlawan yang selamanya akan dikenang oleh bangsa ini. Tidak ada kata yang pantas untuk membalas jasa-jasanya terhadap negarawan seperti dia.

Dua sejoli Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII sangat merespon baik proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yaitu dengan terbitnya maklumat 5 September 1945. Dengan maklumat 5 September yang telah mendapat persetujuan Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dapat diartikan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari wilayah kesatuan Indonesia.

Selanjutnya dia tetap konsisten dengan keputusannya untuk bergabung dengan RI dengan upaya totalnya mempertahankan kemerdekaan. Totalitasnya ditunjukkan dengan pengorbanannya dalam membiayai negara, yang pada awal kemerdekaan belum memiliki negara untuk membiayai penyelenggaraan negara. Seperti seorang bapak kepada anaknya, seolah dia bertanggung jawab penuh atas nasib negara yang baru lahir ini. Apapun dilakukannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sosoknya yang tidak banyak bicara lebih memilih diam ketika ditanya tentang fakta sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949, demi keutuhan negara RI. Ini membuktikan bahwa dia tidak

membutuhkan nama untuk eksistensinya. Namun dengan sikapnya yang demikian, membuat orang semakin simpati terhadapnya. Makin banyak orang yang mengelu-elukan namanya, sebelum atau setelah dia meninggal.

Kapasitasnya sebagai menteri pertahanan mengantarkan dia untuk mewakili Indonesia dalam sebuah upacara penyerahan kedaulatan RI. Sebelumnya dia memberikan ide serangan umum 1 Maret dengan Soeharto sebagai eksekutor dalam peristiwa bersejarah itu.

Jasa-jasa Sultan yang begitu besar terhadap bangsa dan negara hanya bisa dihargai dengan memberikan gelar pahlawan nasional kepadanya, dan anugerah Yogyakarta sebagai kota revolusi. Semoga saja anugerah tersebut tidak senantiasa tercerabut dari akar revolusionernya.

B. SARAN

Tulisan tentang HB IX telah banyak di tulis oleh banyak sejarawan tetapi tidak ada satu pun yang di masukkan dalam kurikulum di sekolah. Oleh karena itu, sejarah yang sekarang masih menjadi kontroversi sebaiknya ditampilkan saja secara objektif sehingga generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah juga akan terbekali dirinya dengan sejarah nasional Indonesia secara utuh tanpa ada yang di reduksi ataupun di tambah-tambahi. Kearifan seorang sejarawan untuk mengungkap sejarah secara objektif untuk kepentingan bangsanya sendiri adalah lebih baik dari pada melaksanakan proyek untuk kepentingan yang membahayakan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Yusra, *Biografi Komat-Kamit Selo Sumardjan* Jakarta:Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Anton Bekker dan Ahmad Chares Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Abdurahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana, 1999.
- G. Moedjanto, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta : Kanisius, 1994
- G. Moejanto, *Konsep kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius. 1987.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* Yogyakarta. Benteng Budaya, 1995
- Louis *Gottshalk*, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto.Jakarta : UI press, 1986.
- Mohammad Rozin, DKK. *Tahta Untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Marwati Djoened Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta: Balai Pustaka tahun 1993.
- Majalah *Tempo*, Laporan Utama : “Sri Sultan Pulang, dan jadilah Ia Lambang” edisi 8 Oktober 1988.
- Majalah *Tempo*, 23 Agustus 1986 dalam Laporan Utama
- M. Alwi Dahlan, *Istana Presiden Indonesia* Jakarta : Sekretaris Negara RI, 1979.
- Majalah *Editor* edisi 08 Oktober 1988 dalam berita utama “ *Mangkatnya Ngarso Dalem yang pendiam : Raja yang Jujur dan Demokrat*.
- Muhammad Roem dkk, “Tahta Untuk Rakyat : *Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX* “,Jakarta,PT Gramedia, 1982.

- Pramoedya Ananta Toer dan Koeslah S. Toer, *Kronik Revolusi Indonesia*, Jakarta: KPG dan Yayasan Adikarya IKAPI, 1999.
- Purwadi, *Sejarah Raja-Raja Jawa : Sejarah Kehidupan Kraton dan perkembangannya di Jawa*, Yogyakarta, Media Abadi, 2007.
- Purwadi, *Sejarah Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX*, Yogyakarta: Hanan Pustaka, 2006.
- Republika Online. Republika Company. All Rights Reserved, *Penyerahan Kedaulatan di Istana Gambir*, Alwi Shahab (wartawan Republika), Sabtu, 27 Desember 2008 pukul 13:23:00
- Ricklefs. M.C., *Sejarah Indonesia Modern*. Terj. Yogyakarta: UGM press, 1991.
- Ritzer, George–Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, edisi keenam, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutrisna Kutoyo, *Sri Sultan HB IX Riwayat Hidup dan Perjuangan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Sutrisno Kutoyo (ed)., *Sejarah DIY*, Jakarta: Depdikbud, 1977.
- Sekolah Staf dan Komando TNI AD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Latar Belakang dan Pengaruhnya*, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1990.
- Tashadi dkk., *Keterlibatan Ulama di DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, Jakarta: Depdiknas, 2000.
- Tashadi dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, Jakarta: Depdikbud, 1987.
- Hasil Work Shop Syarikat Indonesia dalam program penelitian dan pengorganisasian perempuan korban 65, di Wisma Sar Gedhe, 04- 08 Juli 2003
- <http://www.kompas.com>. Sarapan Pagi Kompas Cyber Media, Jumat, 01 Maret 2002, 07:07 WIB

<http://www.Jakartapress.com>, *Benarkah* Serangan Umum Idenya Sultan HB IX?,
Jumat, 27/02/2009 | 16:37 WIB, oleh Arief Turatno

<http://www.setwapres.go.id/xhtml/> diakses pada tanggal 12 Februari 2009

<http://webugm@ugm.ac.id> webugm@ugm.ac.id. Portal Universitas Gadjah Mada ©
Universitas Gadjah Mada,

<http://www.detikforum.com> , tentang HB IX. Diakses pada 27 Februari 2009

<http://www.wikipedia.com>, tentang peta Yogyakarta, di akses pada 27 Februari 2009

<http://www.clik.to/toleransi>, Serangan Oemoem 1 Maret 1949 oleh Batara
Hutagalung

<http://www.Wikipedia.com>, Serangan Umum 1 Maret 1949